

# KESENJANGAN INSTITUSI, INTEGRASI EKONOMI DUNIA DAN IMPLIKASINYA KEPADA INDONESIA

## 1. Pendahuluan

**D**ua penggerak perubahan ekonomi dunia dewasa ini adalah globalisasi dan inovasi teknologi. Negara-negara dan perusahaan-perusahaan di dunia terbelah berdasarkan perilaku dan ketanggapan (*response*) terhadap globalisasi dan kapasitasnya dalam melakukan inovasi dan mengadopsi teknologi. Kedua proses (globalisasi dan inovasi teknologi) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan karena sebagian merupakan penyebab (*drivers*) dari proses inovasi teknologi.

Globalisasi, yang didefinisikan sebagai proses integrasi produksi, distribusi dan penggunaan barang dan jasa di antara perekonomian-perekonomian dunia, telah terjadi sejak akhir Perang Dunia II. Tanda-tanda globalisasi dimanifestasikan dalam peningkatan dan perpindahan arus faktor-faktor produksi (modal dan tenaga kerja serta teknologi) dan peningkatan arus barang yang diperdagangkan di pasar internasional. Volume perdagangan dunia tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan *output* dunia.

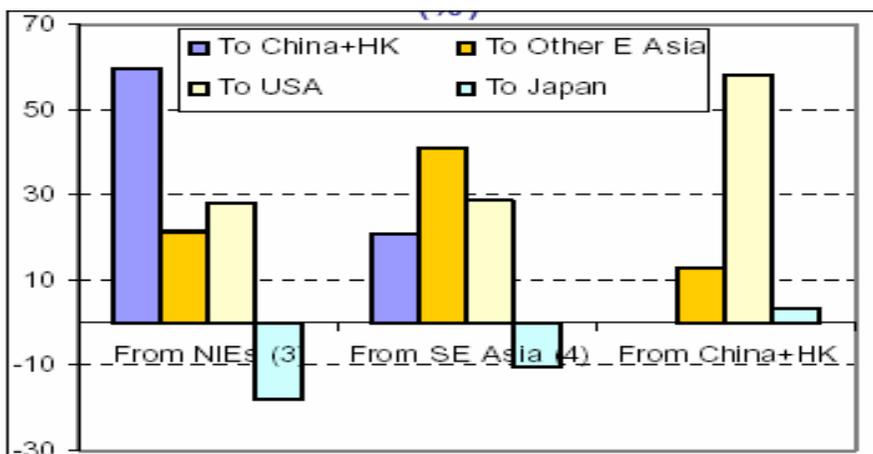
Proses relokasi dan integrasi produksi lintas batas negara telah dipercepat oleh peningkatan arus modal swasta terutama dalam bentuk investasi langsung asing (FDI), yang sering berkaitan dengan strategi produksi global perusahaan-perusahaan trans atau multinasional. Kemajuan teknologi

**Mohamad Ikhsan**<sup>1</sup>

yang telah mengurangi biaya transportasi, biaya komunikasi dan biaya transaksi finansial, bersamaan dengan penurunan hambatan perdagangan, telah memperbesar peluang bagi setiap pelaku ekonomi untuk mencari tempat yang menghasilkan ongkos produksi terendah untuk basis ekspor dan atau pasar lokal. Dari perspektif negara penerima, pemasukan modal memperbesar kapasitas untuk mengimpor dan meningkatkan ekspor dalam periode tertentu. Jika pemasukan modal digunakan untuk meningkatkan kapasitas penawaran domestik dan mendorong daya saing internasional, negara penerima akan memperoleh pertumbuhan produktivitas dan ekspor. Negara penerima akan menikmati keuntungan produktivitas melalui transfer teknologi yang biasanya berkaitan erat dengan investasi asing langsung. Perubahan metode spesialisasi dari *vertical division of labor* menjadi *horizontal division of labor* memaksa perusahaan transnasional - yang umumnya melakukan inovasi teknologi - untuk menyebarkan alih teknologi kepada para *vendor*-nya di negara-negara berkembang.

Kompetisi di antara perusahaan-perusahaan transnasional merupakan faktor lain yang menyebabkan alih teknologi makin mudah dilakukan dewasa ini. Ambil contoh, kasus industri otomotif di Indonesia. Pengembangan Toyota Kijang baru berjalan lebih cepat setelah industri-industri otomotif Korea Selatan mencoba menggebrak pasar domestik Indonesia melalui mobil Timor (KIA) dan Hyundai atau Daewoo. Dampaknya bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan di pasar regional Asia Tenggara. Toyota dan Honda telah melakukan ekspansi yang bersifat struktural yang dengan mengembangkan industri-industri penunjang di kawasan Asia Tenggara yang sebelumnya hanya dijadikan pasar belaka.

**Gambar 1**  
**Peningkatan Ekspor sebagai Penerimaan Tahun 2002**



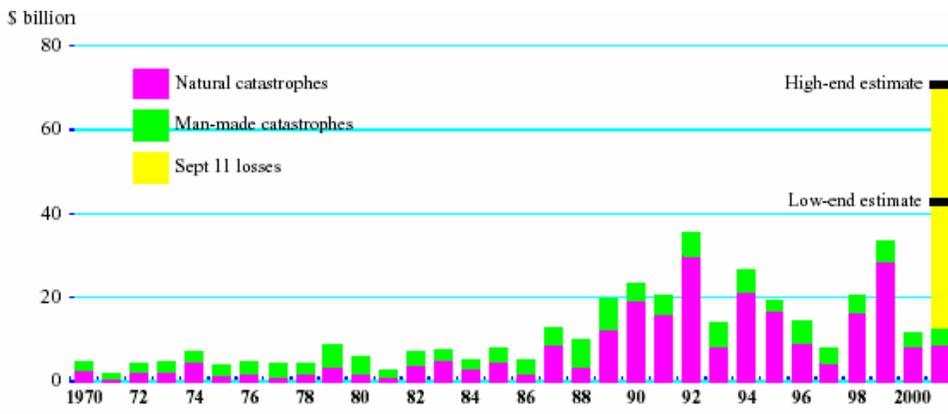
Source : IMF Directions of Trade

Dua faktor utama yang telah menyebabkan perubahan yang lebih signifikan di negara-negara Asia Pasifik dibandingkan belahan dunia lain yaitu (ADB, 2003) : munculnya Cina sebagai *industrial powerhouse* di kawasan ini. Implikasinya terlihat dari peningkatan *intratrade* dimana sumbernya berasal dari Cina.

Faktor kedua adalah *cyclical overcapacity* dalam beberapa sektor elektronika seperti *dynamic random access memory* (DRAM), komputer dan telepon seluler. Kombinasi dua faktor ini telah mendorong peningkatan kompetisi dan menyebabkan terjadi persaingan volume dan tingkat keuntungan yang tipis. Hal ini memungkinkan *spread out* teknologi makin lebih cepat dan mempercepat proses globalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir globalisasi mengalami hambatan yang cukup signifikan. *Double standard* yang dipraktekkan oleh negara industri khususnya Amerika Serikat yang enggan melepaskan praktek proteksi khususnya untuk produk-produk pertanian telah menimbulkan keengganan atau penolakan dari negara-negara berkembang untuk melanjutkan atau mempercepat proses penurunan hambatan perdagangan. Aksi global yang dipelopori oleh kelompok NGO yang dipersepsikan untuk menghambat proses globalisasi jika ditelaah lebih mendalam sebetulnya tidak ditujukan untuk menghambat proses globalisasi tetapi lebih ditujukan untuk memperbaiki proses tawar menawar antara negara maju dan negara berkembang yang dianggap masih sangat timpang (Elliot, 2002).

Globalisasi diperkirakan akan hambatan akibat adanya ancaman terorisme internasional. Terdapat beberapa saluran yang dapat menyebabkan terjadi keterkaitan antara globalisasi dan terorisme. Pertama, terorisme menyebabkan biaya asuransi meningkat yang pada gilirannya peningkatan biaya perdagangan. Estimasi sektor asuransi akibat serangan WTC 11 September 2001 diperkirakan akan berkisar antara US\$ 30 milyar hingga US\$ 58 milyar merupakan kerugian terbesar dalam sejarah klaim asuransi

**Gambar 2**  
**Kerugian Asuransi, 1970-2001**

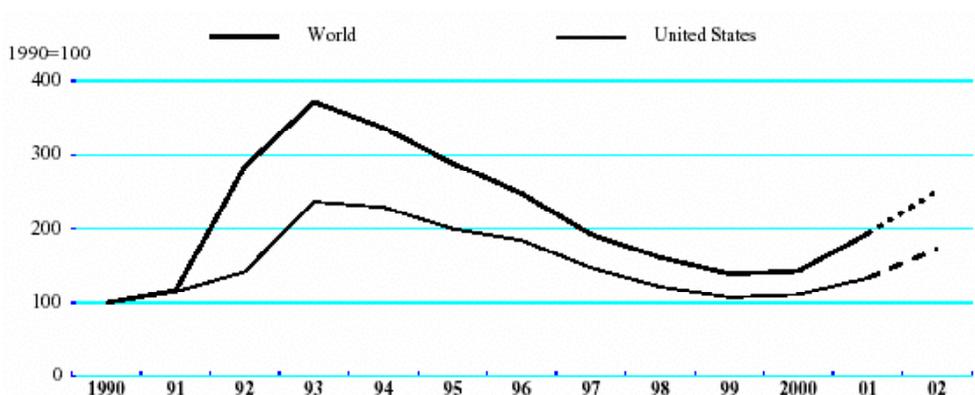


Source : Swiss Re, Economic Research & Consulting and OECD

(lihat **Gambar 2**). Melihat pengalaman ini menjadi sangat beralasan jika diperkirakan premi asuransi pengangkutan barang dan penumpang akan mengalami peningkatan yang pada gilirannya menahan tren penurunan biaya transportasi yang terjadi secara persisten dalam 20 tahun terakhir.

Kedua, peningkatan hambatan bukan tarif sebagai cara untuk menghambat menjalarnya bio terorisme yang sangat merugikan negara berkembang dan perdagangan produk pertanian. Negara-negara miskin terutama dirugikan mengingat keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam mengadopsi persyaratan baru dalam upaya memasuki (*market access*) pasar Negara Maju.

**Gambar 3**  
**Reinsurance Rates**



1. “Rate on line” data, referring to the rate which, when multiplied by the indemnity, when multiplied by the indemnity, would produce the premium. Dotted line for 2002 are secretariat estimates, assuming a 30% increase in rates.

Source : Guy Carpenter ([www.guycarp.com](http://www.guycarp.com)) and OECD

Ketiga, peningkatan keamanan telah menyebabkan perlambatan dalam arus turisme dan berimplikasi pula ada proses perdagangan karena sebagian dari proses perdagangan di banyak negara terkait dengan kegiatan pariwisata.

## **2. Tren dan Kecepatan Integrasi Ekonomi**

Rasio perdagangan (ekspor plus impor) terhadap *output* (GDP) merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur integrasi dunia, sementara kecepatan integrasi diukur dengan perbedaan antara pertumbuhan perdagangan dan PDB. Rasio perdagangan terhadap *output* dunia telah meningkat lebih dua kali lipat dalam 35 tahun ini dari 21 persen (1960) menjadi sekitar 48% pada tahun 1995.

Namun rasio perdagangan terhadap *output* dari negara berkembang ternyata meningkat lebih lambat dari rata-rata dunia yaitu dari 41% pada tahun 1960, menjadi

47% dalam tahun 1995. Hal ini mengisyaratkan bahwa banyak negara berkembang yang masih mempertahankan rezim proteksi.

World Bank (1996, 2002) menyimpulkan bahwa:

- a. Kecepatan integrasi di antara negara berkembang sangat berbeda. Banyak negara berkembang yang berada di antara negara kurang terintegrasi dengan negara yang lebih terintegrasi. Rasio perdagangan terhadap *output* menurun pada 44 negara menjadi 93 negara berkembang, sementara rasio investasi langsung terhadap PDB turun pada lebih dari 30 negara berkembang.
- b. Negara yang lebih terintegrasi cenderung akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian negara yang kurang yang terintegrasi. Sebagai konsekuensinya, kelompok negara ini cenderung memiliki kecepatan integrasi yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok negara berkembang yang kurang terintegrasi.
- c. Kebijakan ekonomi yang tepat (*sound economic policies*) memainkan peranan penting dalam menentukan baik pertumbuhan maupun kecepatan integrasi.

Seperti yang telah disinggung sedikit di atas, analisis tentang kecepatan integrasi ekonomi dapat diobservasikan dari empat indikator yaitu rasio perdagangan terhadap PDB, rasio investasi asing langsung terhadap PDB, *Institutional Credit Rating* dan pangsa ekspor manufaktur dalam total ekspor yang kemudian dibuat menjadi satu indeks integrasi ekonomi.

Berdasarkan indeks integrasi tersebut, kita dapat mengelompokkan negara yang tergolong sangat cepat berintegrasi dengan pasar internasional hingga kelompok negara yang sangat lamban. Negara-negara Asia Timur termasuk Indonesia tergolong dalam kelompok yang sangat cepat melakukan integrasi ekonomi. Termasuk dalam kelompok ini selain negara-negara Asia Timur adalah kelompok negara yang melakukan reformasi ekonomi seperti Chili, Argentina, Meksiko, Maroko, Ghana Mauritius, Ceko, Hungaria dan Turki. Kenaikan yang pesat dari ekspor hasil manufaktur serta kenaikan aliran modal investasi langsung merupakan kontributor utama dari percepatan integrasi ekonomi kelompok ini.

### **3. Peranan Reformasi Kebijakan dan Integrasi Ekonomi**

Reformasi kebijakan yang didesain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi cenderung mempengaruhi kecepatan integrasi ekonomi suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan. Reformasi kebijakan yang mempromosikan kondisi-kondisi makroekonomi yang stabil, nilai tukar yang realistis, rezim perdagangan dan investasi yang terbuka merupakan faktor-faktor yang penting untuk pertumbuhan dan integrasi. Di samping itu infrastruktur telekomunikasi dan transportasi juga berperan penting dalam mempengaruhi integrasi ekonomi.

Kebijakan makroekonomi mempengaruhi integrasi secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui dampak pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroekonomi yang jelek akan mempengaruhi integrasi secara langsung, misalnya dampak ketidakpastian makroekonomi terhadap investasi langsung, aliran modal lainnya dan investasi dalam sektor ekspor. Volatitas makroekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan investasi di Amerika Latin dalam periode 1960-85 sebanyak 5% dari GDP. (Hausman dan Gavin, 1995). Studi lain oleh Schmidt-Hebbel (1995) menunjukkan ketidakstabilan makroekonomi telah menurunkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang dalam periode 1960-90 sebanyak 0,9% per tahun.

Ketidakstabilan ekonomi terutama menurunkan kepercayaan investor asing - yang kurang mengenal perekonomian setempat, dan memiliki pilihan yang lebih banyak dalam menempatkan dananya di luar negeri. Akibatnya, investor asing akan cenderung memberikan premi yang lebih tinggi terhadap perekonomian yang kurang stabil (World Bank, 1996).

Ketidakstabilan dalam nilai tukar dan inflasi - yang sebetulnya saling berkaitan - merupakan faktor-faktor yang mencegah terjadinya pembentukan modal tetap di suatu negara termasuk dalam sektor ekspor. Caballero dan Corbo (1989) menemukan perubahan nilai tukar riil berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekspor. Hal yang serupa ditemukan oleh Roberts, Sullivan dan Tybout (1995) untuk kasus Columbia, Meksiko dan Maroko, dalam fluktuasi harga. Negara yang termasuk kelompok yang lambat dalam integrasi, cenderung memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang relatif cepat proses integrasi ekonominya. Defisit anggaran merupakan kontributor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.<sup>2</sup> Defisit anggaran dapat mempengaruhi integrasi ekonomi melalui cara lain terutama jika defisit tersebut dibiayai oleh utang luar negeri. Tambahan utang luar negeri, *ceteris paribus*, akan mendorong apresiasi nilai tukar riil, yang akan menyebabkan perubahan alokasi sumber daya ke arah sektor *non traded*, dan menghambat ekspor dan investasi asing. Apresiasi nilai tukar riil yang disertai dengan tingkat inflasi akan dapat pula mendorong pelarian modal yang biasanya berhubungan dengan defisit anggaran.

---

<sup>2</sup> Walaupun defisit anggaran berhubungan dengan besarnya pengeluaran anggaran pemerintah, tetapi tidak berarti besarnya anggaran pemerintah tidak dapat berfungsi sebagai stabilisator. Sebagaimana yang disarankan oleh Keynes, anggaran pemerintah dapat digunakan sebagai stabilisator (*fine tuning*) perekonomian. Saat perekonomian melemah, pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan menginjeksi perekonomian dan sebaliknya pada saat terjadi kelebihan permintaan surplus anggaran harus dapat difungsikan. Fungsi ini berjalan dengan baik di negara-negara Asia Timur dan Amerika Serikat pada tahun 1960-an dan 1980-an. Masalahnya terletak pada bagaimana alokasi anggaran tersebut diarahkan. Studi terbaru oleh Dani Rodrik dari Columbia University, NY (1996) memberikan indikasi tentang pembenaran pendapat Keynes ini terutama untuk kondisi perekonomian terbuka dan berlawanan dengan pandangan yang umumnya dianut oleh para ekonom yang menganggap peranan pemerintah harus diminimisasikan untuk mengurangi distorsi.

Faktor kedua yang berkaitan dengan reformasi kebijakan adalah kebijakan perdagangan dan investasi. Jelas, integrasi ekonomi menuntut kebijakan yang terbuka baik dalam perdagangan dan investasi. Kebijakan perdagangan dan investasi yang tertutup menghambat impor - terutama impor bahan baku yang dibutuhkan untuk produk-produk manufaktur ekspor - dan menghambat investasi asing. Proteksi cenderung akan merubah harga relatif produk yang mendorong investor untuk mengeksploitasi pasar domestik dengan meraup rente ekonomi yang lebih besar. Konsumen domestik akan dirugikan karena mereka harus membayar lebih mahal dan bisa jadi kualitasnya di bawah standar internasional. Karena hampir semua perusahaan asing beroperasi dalam jaringan internasional yang kompleks, proteksi (yang biasanya akan diikuti dengan praktek korupsi dan berbagai praktek “red-tape”) jelas akan mengurangi daya tarik negara terhadap jaringan ini.

Ketersediaan dan realibilitas infrastruktur merupakan faktor ketiga yang menjamin keikutsertaan suatu negara dalam jaringan global (Porter, 1990). Banyak kasus dimana suatu negara memiliki keunggulan komparatif, tetapi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam negeri gagal mengimplementasikan keunggulan komparatif ini karena ketidakcukupan - atau kalau pun ada tersedia dalam kualitas yang tidak memadai - jaringan atau fasilitas infrastruktur. Contohnya, kasus tepung tapioka atau produk-produk hasil pertanian. Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan Thailand. Tetapi karena jaringan infrastruktur yang relatif kurang memadai menyebabkan Indonesia kalah dalam memanfaatkan peluang untuk bersaing di pasar internasional. Dewasa ini persaingan dan jaringan produksi yang kompleks ini menuntut ketepatan waktu pengiriman, komunikasi yang lancar yang semuanya tentunya berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas dari infrastruktur (jaringan telpon, listrik, jalan raya dan pelabuhan udara/laut). Pola jaringan ini didukung oleh makin menurunnya biaya baik secara nominal maupun riil dari pengiriman barang, komunikasi, pengolahan informasi. Misalnya biaya pengiriman satu kontainer barang dari Jakarta ke Singapura telah menurun hingga lebih 50% selama 10 tahun terakhir. Begitu pula dengan biaya pengolahan data. Selama dua puluh tahun (antara tahun 1975-95), biaya pengolahan data per unit menurun 100 kali dan diperkirakan akan menurun lagi walaupun tingkat penurunan cenderung akan melamban (World Bank, 1995). Kasus serupa juga terjadi dengan biaya komunikasi, dimana biaya percakapan domestik maupun internasional makin murah. Jaringan internet telah memungkinkan pula pilihan dalam komunikasi makin beragam<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Jaringan internet telah menyatukan dunia dan mempercepat proses alih teknologi atau pemasaran produk. Produsen di Jakarta misalnya secara mudah akan dapat mengetahui *trend* mode yang sekarang terjadi di pasar mode dunia. Bahkan beberapa majalah fashion telah membuka *outlet*-nya di jaringan internet yang telah mempercepat perancang mode mengikuti *trend* di pasar.

Makin banyak pula produk-produk manufaktur (tidak hanya produk-produk elektronika) yang tergantung pada ketersediaan dan realibilitas listrik atau jaringan telpon. Produksi tekstil dan garmen pun yang kini makin tinggi tingkat intensitas teknologinya malah makin tergantung pada ketersediaan listrik. Hasil studi LPEM dan Bank Dunia menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia (terutama Jabotabek) harus membayar ongkos ekonomi sebanyak Rp 154 milyar per tahun karena PLN gagal memasok listrik dan menjamin realibilitasnya.

Dampak positif dari perbaikan infrastruktur bukan hanya dinikmati oleh produsen besar tetapi juga petani kecil dalam mengadopsi pasar global. Studi Takayama (1994) menunjukkan bahwa petani coklat di Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir menikmati kenaikan harga yang diterimanya walaupun harga internasional cenderung menurun. Penyebabnya adalah penurunan marjin perdagangan dan transportasi. Perbaikan jalan menyebabkan ongkos transportasi makin murah dan memungkinkan interaksi petani yang lebih luas dengan pedagang di pasar tingkat kabupaten. Informasi harga yang diperoleh petani dari Radio BBC atau kawat berita Reuter yang dilanggan oleh asosiasi produsen memungkinkan *bargaining position* yang lebih kuat dari petani mengurangi kemampuan tengkulak mengeksploitasi rente ekonomi dari petani coklat.

Konsekuensi dari perubahan dan kompetisi dalam infrastruktur ini menuntut perubahan yang bersifat kelembagaan. Artinya, pembukaan pasar sektor infrastruktur mesti dilakukan segera. Perubahan teknologi telah memungkinkan pasar - yang sebelumnya tergolong monopoli alamiah - diikuti oleh lebih satu partisipan. Pengalaman deregulasi telekomunikasi di AS telah menurunkan biaya percakapan telpon jarak jauh dan internasional dan mengundang lebih banyak investor untuk beroperasi. Sebagai contoh, ongkos percakapan dari AS ke Indonesia menurun lebih dari 2 kali lipat dalam dua tahun belakangan.<sup>4</sup>

#### **4. Reformasi Institusi dan *Institutional Gap* serta Kebutuhan Peran Pemerintah dalam Memaksimumkan Dampak Globalisasi bagi Indonesia**

Perusahaan tidak bekerja dalam ruang hampa. Perusahaan ini tidak akan bersaing atau sukses dalam persaingan jika institusi pasar tidak tersedia atau komplit dan peran pemerintah yang tidak terdefiniskan dengan baik. **Gambar 1** menunjukkan bahwa infrastruktur kelembagaan mempengaruhi bagaimana perusahaan mengembangkan

---

<sup>4</sup> Persaingan di antara ATT dan MCI dalam merebut konsumen telah menguntungkan para pelajar dan mahasiswa Indonesia di AS. Dalam dua tahun terakhir, konsumen MCI atau ATT minimal selama 6 bulan dapat menikmati harga percakapan per menit tanpa restriksi hingga US\$ 43. Kebebasan untuk pindah operator bisa menyebabkan konsumen menikmati harga tersebut dalam setahun penuh

kewiraswastaan dan kapasitas teknologi. Dengan demikian strategi pembangunan memerlukan kemitraan kerja (*working partnership*) antara pemerintah dan pasar (Stern dan Stiglitz, 1997). Tujuan utama dari kemitraan ini adalah menciptakan “well functioning market economy”. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana komposisi peranan negara dan pasar dan bagaimana keduanya berjalan.

Secara umum kinerja swasta dan insentif bekerja lebih baik dibandingkan pemerintah. Hal ini berarti kegiatan produksi dan alokasi sumber daya diserahkan kepada mekanisme pasar dan sektor swasta sementara pemerintah menyediakan infrastruktur kelembagaan atau dengan kata lain berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Prinsip ini tidak menjamin akan terciptanya hasil yang optimum secara sosial mengingat potensi kegagalan pasar cukup besar bahkan pada negara dimana kerangka institusinya telah bekerja dengan baik (Stiglitz, 2000 dan 2002). Karena itu peranan negara pun tergolong unik dan dinamis. Jika mekanisme pasar tidak mampu bekerja dalam menyediakan barang dan jasa negara harus melakukan intervensi untuk menyelesaikan kegagalan pasar ini. Tetapi pada saat pasar berkembang dan sektor swasta telah mampu menyelesaikannya peran negara harus diminimisasi untuk memfasilitasi pembangunan pasar (*market development*).

Mekanisme di atas akan bekerja dengan baik jika *appropriate institution* tersedia dan bekerja menjembatani program kemitraan pemerintah dan swasta ini. Institusi diperlukan dalam pembangunan ekonomi mengingat adanya kegagalan pasar sebagai akibat mahalnya informasi dan pelaku pasar tidak menggunakan semua informasi yang diperoleh atau tidak mampu diperoleh atau yang dikenal dengan *terminology of Bounded Rationality* (North, 1995). Ketidaktepatan informasi dan keterbatasan dalam kapasitas mengolah informasi akan mempengaruhi biaya transaksi yang mendasari pembentukan institusi. Biaya transaksi muncul akibat informasi mahal dan tidak simetris. Biaya yang muncul bukan hanya untuk menjamin terjadinya transaksi melainkan pula biaya monitoring dan biaya penyelenggaraannya.

Institusi dikembangkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pertukaran. Bersama-sama dengan teknologi yang digunakan, institusi akan menentukan biaya transaksi. Pelaku ekonomi yang menguasai informasi dapat dengan mudah merenggut keuntungan karena institusi merupakan *social capital* yang sebagaimana faktor produksi lain seperti modal, tenaga kerja dan teknologi serta *human capital* ikut menentukan tingkat *output* atau kesejahteraan dari suatu negara. Kasus dalam sektor finansial merupakan salah satu contoh tentang bagaimana pentingnya institusi dalam pembangunan ekonomi. Masalah-masalah ketidaktepatan ini muncul hampir di setiap kegiatan ekonomi selama terdapat potensi kegagalan mekanisme pasar yang diakibatkan oleh eksternalitas dalam

produksi<sup>5</sup>, eksistensi barang publik<sup>6</sup>, ketidaksempurnaan pasar,<sup>7</sup> *hidden action*<sup>8</sup> dan *hidden type*<sup>9</sup> serta *unforeseen contingencies*<sup>10</sup> (Bates, 1995).

## **5. Institusi, Negara, dan Kinerja Ekonomi**

Ketidaksempurnaan mekanisme pasar selalu dijawab dengan intervensi negara untuk menjamin agar biaya transaksi minimum termasuk di dalamnya terlibatnya negara dalam kegiatan produksi. Untuk membatasi diskusi intervensi negara dalam hal ini difokuskan dalam fungsi negara sebagai fasilitator dan regulator.

Berkaitan dengan hal ini, negara memproduksi aturan formal yang merupakan bagian dari lingkungan institusi. Jadi negara merupakan suatu organisasi yang unik, karena institusi ini harus mengembangkan dan menetapkan aturan-aturan formal melalui proses sosial dan politik. Negara juga harus memainkan peranan ini sebagai bagian dari organisasi.

---

<sup>5</sup> Eksternalitas dalam produksi menyebabkan sistem insentif secara privat dan sosial berbeda yang berakibat suatu komoditi bisa terlalu besar atau terlalu sedikit diproduksi. Keduanya menimbulkan inefisiensi dilihat dari kepentingan sosial. Misalnya dalam kasus penggunaan air yang terlalu berlebihan atau terlalu sedikit *job training* merupakan salah contoh dari masalah ini. Untuk mengatasinya aturan main dalam menggunakan air mesti dibuat atau negara harus terjun dalam menyediakan jasa *training* yang tidak disediakan oleh mekanisme pasar.

<sup>6</sup> Masalah barang publik muncul karena sebagai individual yang rasional, konsumen tidak memasukkan pengaruh baik *benefit* atau *cost* yang mereka hasilkan sebagai akibat keputusan mereka. Pilihan konsumen secara individual ini akan menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien antara penyediaan barang publik dan privat karena dalam penyediaan barang publik masyarakat sebagai makhluk yang rasional akan bertindak sebagai *free rider*. Daripada menanggung biaya untuk penyediaan barang publik, masyarakat akan cenderung mengeksploitasi *non-rivalrousness* dan *non-excludability* dan menikmatinya secara gratis. Akibatnya dalam keseimbangan penyediaan barang publik menjadi tidak efisien. Lagi-lagi institusi dibutuhkan untuk mengatur agar penyediaan barang publik memadai dan akan mengurangi biaya transaksi.

<sup>7</sup> Lihat contoh dalam kasus sektor finansial.

<sup>8</sup> Kasus dalam sektor finansial atau sektor pendidikan serta pasar tenaga kerja atau pasar tanah di daerah pedesaan merupakan kasus yang menarik sebagai akibat *hidden action*. Contoh klasik yang sering digunakan adalah kasus *sharecropping* dalam produksi hasil pertanian. Walaupun *sharecropping* merupakan keseimbangan yang tidak efisien dibandingkan sistem lain tetapi sering digunakan di banyak negara di dunia. Fenomena tingginya biaya monitoring telah menciptakan masalah agensi yang akhirnya menyebabkanketidakefisienan mode yang terpilih.

<sup>9</sup> Masalah ini hampir serupa dengan *hidden action*. Kasus *lemon market* oleh Akerlof merupakan contoh klasik. Membeli kucing dalam karung merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan kasus ini dan terjadi secara intensif di pasar tenaga kerja dimana kita tidak bisa tahu persis kualitas tenaga kerja yang kita pekerjakan. Karena itu biaya pencarian tenaga kerja menjadi mahal. Standarisasi tenaga kerja merupakan salah satu solusi institusi untuk mengatasi masalah ini. Contoh lain adalah dalam kasus penjualan mobil bekas dimana kita sebagai pembeli tidak tahu persis tentang kualitas mobil yang dibeli. Contoh serupa dalam hal penjualan susu. Tanpa ada standarisasi kita tidak yakin tentang kualitas susu yang kita beli sehingga standarisasi kualitas merupakan jawaban institusi untuk mengatasi masalah ini.

<sup>10</sup> Masalah ini muncul karena ketidakmampuan manusia untuk melihat masa depan dan menimbulkan ketidakpastian. Jenis ini terutama muncul dalam pasar modal.

Negara juga dapat mempengaruhi kinerja perekonomian melalui penciptaan lingkungan makroekonomi dan mikroekonomi yang stabil dan kondusif untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien. Di samping itu penciptaan lingkungan kelembagaan seperti *property right*, kedamaian, keamanan dan aturan main akan mendorong terciptanya investasi jangka panjang yang efisien. Elemen kelembagaan ketiga yang dibutuhkan dan perlu disediakan oleh negara adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Rodrik (2000) menambahkan ketiga elemen di atas dengan dua elemen lain yang tidak kalah penting yaitu tersedianya *social safety net* dan institusi untuk manajemen konflik.

Studi empiris yang dilakukan Commandor, Davoodi dan Lee (1996) dan Rodrik (2000) memberikan fakta tentang pentingnya keenam elemen institusi secara bersama dalam mempengaruhi kinerja perekonomian. Studi yang pertama menunjukkan bahwa pada negara dengan institusi dan kebijakan yang lemah, pendapatan per kapita hanya tumbuh sebesar 0,4 persen per tahun. Sementara pendapatan per kapita di negara yang memiliki institusi yang kuat dan kebijakan ekonomi yang kuat mampu tumbuh 3 persen per tahun. Bukti yang sama juga dijumpai dalam studi yang dilakukan oleh Rodrik (2000).

- Seringkali peraturan yang disediakan tidak memadai dalam mengatur perilaku pelaku pasar. Contohnya adalah ketiadaan *property rights* di negara-negara seperti Uni Sovyet merupakan contoh dari kegagalan negara. Kasus mikro di perkebunan di Indonesia dapat merupakan contoh jika kita coba ingin membandingkan kinerja PTP dan perkebunan swasta atau antara PTP dengan perkebunan di Malaysia yang notebene belajar menanam karet atau kelapa sawit dari Indonesia.
- Kegagalan pemerintah bisa saja bukan melalui dampaknya melalui lingkungan institusinya melainkan melalui cara dimana organisasi menggunakannya terutama sebagai sistem insentif. Negara dapat mengenakan pajak yang sangat tinggi melalui distorsi dalam nilai tukar dan harga atau melalui pembentukan badan regulasi seperti larangan ekspor rotan atau pembentukan BPPC. Negara juga dapat mengenakan biaya transaksi yang besar melalui biaya regulasi yang tinggi atau korupsi.
- Saluran lain yang dapat menyebabkan kegagalan negara adalah melalui ketidakpastian yang diciptakannya. Ketidakpastian dalam kebijakan akan mendorong pelaku ekonomi rasional untuk melakukan di luar aturan main yang disepakati sebelumnya seperti menghindari pembayaran pajak atau pelarian modal.

**Kotak 3 : Elemen yang dibutuhkan untuk menjamin *high quality growth***

Pertanyaan yang bisa kita ajukan elemen institusi apa yang kita butuhkan untuk menjamin proses pertumbuhan yang berkualitas? Dani Rodrik (2000) berargumen terdapat enam elemen yang dibutuhkan sebagai *market supporting institution* yaitu : Hak cipta (*property rights*) ; regulator dan kerangka regulasi ; institusi untuk stabilisasi makroekonomi ; institusi untuk asuransi sosial dan institusi untuk manajemen konflik. Sangat besar kemungkinan jika beberapa institusi tidak " fit " satu sama lain. Dinamika permasalahan dan kemungkinan di atas membuat institusi menjadi dinamis pula. Institusi juga harus berubah sesuai perubahan nilai nilai dalam masyarakat.

*Property Right*

Seperti yang dikemukakan oleh North dan Thomas (1973) dan North dan Weigast (1989). Kepastian hak cipta stabil merupakan elemen yang penting dalam sejarah pertumbuhan ekonomi dunia. Tanpa jaminan terhadap hak cipta, tidak ada satupun *entrepreneur* yang mau mengambil resiko dalam melakukan inovasi padahal inovasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan teknologi kualitas *human capital* dan efisiensi penggunaan modal. Ekonom institusional seperti North - pemenang Nobel Ekonomi tahun 1994 - menekankan tentang "control" dari kepemilikan. Hal ini berarti penguasaan tentang hak cipta pun sebetulnya bukanlah hak yang mutlak dan mempunyai insentif bagi *entrepreneur* untuk secara kontinyu melakukan proses inovasi.

*Regulatory Institution*

Mekanisme pasar sempurna hanya ada di dalam buku teks. Pelbagai asumsi dalam mekanisme pasar banyak tidak terpenuhi seperti dalam kasus sektor finansial. Jadi kita akan selalu berada dalam *second best situation*. Karena potensi kegagalan pasar sangat besar, ekonom kemudian ke luar dengan ide pembentukan institusi yaitu undang - undang yang mengatur aturan main dan pembentukan lembaga pengawas sebagai eksekutor. Hasilnya negara yang sangat bebas dalam kompetisi seperti AS justru mempunyai sistem regulasi yang sangat intensif. Sama halnya di sektor finansial dimana stereotip kapitalisme sangat menonjol justru merupakan kegiatan ekonomi yang paling intensif tingkat regulasinya. Mesti diingat pula terutama untuk negara berkembang, institusi regulasi yang dibutuhkan juga harus mampu mengatasi *coordination failures* dan *capital market imperfection*. Dalam ini pengembangan kerjasama pemerintah dan sektor swasta seperti yang dilakukan oleh MITI merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar. Catatan sejarah yang harus diangkat adalah bagaimana membuat mekanisme *picking the winners* dan *exit policy* terdisain dengan baik dan berjalan secara transparan. Yang terakhir menjadi sangat penting berkaitan dengan munculnya masalah *too big to fail* yang seringkali harus menelan biaya pemerintah untuk penyelamatkannya.

*Institusi Kestabilan Makroekonomi*

Inovasi di sisi yang paling ekstrim dan bahkan kegiatan investasi atau kegiatan ekonomi di sisi lainnya hanya bisa dilakukan dalam lingkungan makroekonomi yang stabil. Begitu pun pentingnya kestabilan makroekonomi ini menyebabkan kebijakan ekonomi lainnya cenderung diabaikan misalnya berkaitan dengan pembentukan bank sentral yang independen atau UU yang membatasi pemerintah dalam membiayai defisit dan sebagainya.

*Institusi Asuransi Sosial*

Walaupun institusi kestabilan makroekonomi telah terbentuk, siklus bisnis tetap terjadi. Faktor eksogen seperti faktor musiman menyebabkan fluktuasi dalam siklus bisnis tetap akan terjadi, kemampuan pelaku ekonomi dalam melakukan penyesuaian pun berbeda-beda dan selalu akan menghasilkan pemenang dan pihak yang kalah. Menjadi sangat penting kemudian bagi pemerintah untuk mencapai dua hal yaitu perbaikan kesejahteraan masyarakat dan menjamin proses penyesuaian sendiri untuk menyediakan sistem asuransi sosial. Bagi kelompok yang belum mampu melakukan penyesuaian dalam masa transisi dalam sistem komunal seperti yang berlaku di Indonesia fungsi ini diambil alih oleh masyarakat atau keluarga, tetapi dengan makin kompleksnya masyarakat dan berkembangnya nilai-nilai individual maka kebutuhan lembaga ini makin penting. Pembentukan institusi sosial dalam kerangka mekanisme pasar berkaitan dengan kebutuhan akan stabilisasi sosial dan keterpaduan sebagai bagian dari fondasi *social capital* yang dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara jangka panjang.

*Institusi Manajemen Konflik*

Bagi negara industri dimana nilai individualnya sangat tinggi, manajemen konflik dapat diatasi dengan lembaga hukum formal, tetapi bagi masyarakat komunal seperti Indonesia, hukum formal tidak cukup untuk mengatasi potensi konflik. Konflik sosial akan dapat merugikan karena dapat menyebabkan kegagalan dalam eksploitasi sumber daya ekonomi dan dapat menghambat kegiatan ekonomi karena ketidakpastian yang diciptakannya. Penciptaan institusi dapat dilakukan dengan pelbagai cara seperti penciptaan kekuasaan hukum, sistem representasi politik yang adil, institusionalisasi perlindungan terhadap kelompok minoritas merupakan salah satu contoh dari institusi ini.

*Sumber:* Dani Rodrik, *Institutions for High Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them*, NBER Working Paper 7540, 2000

Di samping keenam fungsi pokok pemerintah di atas terdapat fungsi lain dalam mendorong terciptanya lingkungan investasi. Intervensi ini dilakukan untuk memperbaiki lingkungan investasi dan mendukung proses inovasi dan pembelajaran (*learning*) bagi perusahaan. Argumen utama untuk membenarkan intervensi ini adalah membantu

perusahaan-perusahaan mengatasi masalah kegagalan informasi (*information failures*) dalam mencari lokasi berinvestasi atau mencari partner dalam melakukan *joint venture*.

Secara spesifik terdapat tiga alasan pembenaran intervensi ini yaitu, pertama, investor potensial mungkin memiliki masalah dalam memperoleh informasi yang relevan tentang negara yang dituju seperti aturan hukum, rezim perpajakan. Menjadi alasan yang kuat kemudian jika untuk menyediakan atau mensubsidi jaringan informasi; kedua, terdapat kegagalan pasar dalam hal kredibilitas dan kemauan (*willingness*) negara lokasi investasi dalam menghormati kontrak jangka panjang. Usaha-usaha untuk memperkuat kredibilitas ini diperlukan; ketiga, investasi langsung (FDI) datang dengan paket yang komplis seperti *know-how package* termasuk metoda produksi, teknik kendali kualitas, dan keahlian manajemen. Negara penerima investasi umumnya mengharapkan investasi yang dilakukan oleh MNC akan bukan hanya meningkatkan kesempatan kerja dan ekspor tetapi juga *knowledge spillovers* yang merupakan dalam hal tertentu merupakan eksternalitas yang pada derajat tertentu merupakan barang publik. Perusahaan MNC umumnya tidak memasukkan eksternalitas (positif) ini dalam evaluasi biaya manfaatnya sehingga akan cenderung melakukan investasi yang lebih kecil dari kuantitas optimal secara sosial. Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk merangsang agar FDI untuk melakukan investasi lebih besar untuk mengisi kesenjangan antara *private return* (kepada MNC) dan *social return* (kepada negara penerima investasi).

Bentuk intervensi pemerintah lain untuk mengisi kegagalan pasar dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

- Kebijakan menarik investasi langsung. Dalam rangka menarik investasi asing pemerintah di negara berkembang termasuk Indonesia sering mencoba menambah *gincu* untuk menarik perusahaan asing dengan menawarkan insentif fiskal seperti penghapusan pajak dalam periode tertentu, *loss write-off*, percepatan depresiasi dan sebagainya. Kebijakan ini dalam prakteknya seringkali lebih banyak memberikan mudaratnya ketimbang manfaatnya. Misalnya pemberian insentif ini tidak menyelesaikan masalah mikroekonomi fundamental yang dihadapi negara yang bersangkutan tetapi hanya memberikan jalan penyelesaian sementara yang akhirnya menyebabkan insentif ini akan tertunda satu sama lainnya. Masalah berikutnya timbulnya diskriminasi perlakuan terhadap sektor-sektor yang tidak tercakup dalam cakupan kebijakan pro-aktif ini. Terlepas dari keuntungan potensial yang dihasilkan dari kebijakan menarik investasi langsung dan mempertimbangkan dampak sampingan akibat kebijakan ini, terdapat konsensus bahwa usaha pemerintah sebaiknya diarahkan untuk meyakinkan investor bahwa pemerintah akan menjalankan kebijakan ekonomi yang solid dan ramah pasar.

Kebijakan diarahkan kepada semua perusahaan baik domestik maupun luar negeri akan mengurangi kegiatan pencari rente dan korupsi. Moran (2002) menunjukkan bahwa *effective contract enforcement, absence of red-tape*, ketersediaan infrastruktur dan kesediaan tenaga trampil merupakan faktor yang dominan dalam menarik FDI di bidang otomotif, elektronika, kimia, peralatan industri dan kesehatan dan jasa-jasa bisnis. Lebih jauh lagi Moriset dan Lumenga (2002) menambahkan prosedur yang berlebihan akan meningkatkan biaya *start-up* dan mengurangi keinginan FDI untuk berlokasi di suatu negara.

- Penciptaan *Export Processing Zones*. Banyak negara termasuk Indonesia mencoba mengatasi masalah kekakuan dalam perubahan institusi dengan menciptakan wilayah khusus yang memungkinkan FDI untuk mendapatkan kemudahan dalam prosedur dan pembebasan pajak atau bea masuk atas *input* atau barang modal. Seperti halnya kebijakan khusus, dampak ekonomi penciptaan EPZ pun dalam kenyataannya masih belum mendua (*inconclusive*). *Net benefit* dari EPZ di suatu negara sebetulnya bervariasi tergantung pada fundamental mikroekonomi suatu negara. Negara-negara yang memiliki fundamental yang tidak baik akan mengalami *net benefit* yang terbatas bahkan negatif sementara negara yang dengan fundamental yang baik akan menikmati keuntungan yang maksimum. Hal ini membuktikan solusi penciptaan EPZ lebih merupakan solusi jangka pendek dan menengah menunggu proses perubahan institusi secara efektif berlaku.
- Mempromosikan *industrial cluster*. Sebagian ekonom menyarankan penciptaan *industrial cluster* untuk mengurangi biaya *start-up* perusahaan dan mengoptimalkan dampak komplementaritas (eksternalitas) dari kegiatan industri yang mempunyai keterkaitan. Pembangunan kawasan industri atau *science park* merupakan contoh. Argumennya adalah aglomerasi industri akan menolong *new entrants* dalam menghemat biaya untuk merekrut tenaga kerja, biaya transportasi dan memanfaatkan keterkaitan dengan industri lain. Namun mesti disadari bahwa prasyarat untuk mengoptimalkan *industrial cluster* seperti Silocon Valley tergantung pada fundamental mikroekonomi seperti hukum paten. Sistem keuangan dan *informal creative culture of inventing* (ADB, 2003). Lagi pula pemerintah akan mendapatkan kesulitan dalam memilih lokasi yang akan dijadikan tombak dalam proses industrialisasi karena pemerintah tidak mempunyai kemampuan dalam memilih daerah yang akan dijadikan *industrial cluster*. Secara umum, efektifitas kebijakan ini sekali lagi tergantung pada lingkungan kebijakan ekonomi dan institusi. Jika perusahaan apakah asing atau lokal beroperasi dalam suatu lingkungan pasar yang berfungsi baik terdapat kecenderungan perusahaan ini akan beroperasi secara aktif dalam suatu keterkaitan atau pengelompokkan

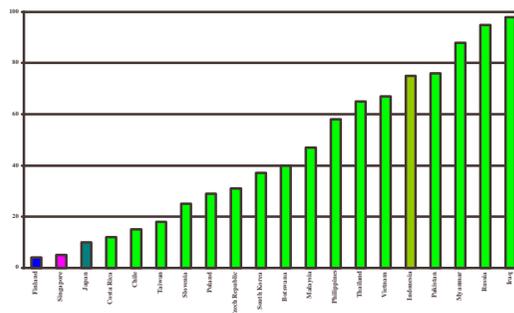
program tanpa harus ada intervensi dari pemerintah. Karena itu pemerintah lebih baik berfungsi sebagai katalis atau inisitor dalam mendukung pembangunan *industrial cluster* untuk menciptakan komplementaritas dengan sektor swasta.

Kesimpulan umum adalah kebijakan intervensi khusus ini akan bekerja dengan baik jika diimplementasikan dengan *broad reform packages*. Tanpa perubahan institusi secara umum yang memperbaiki kondisi fundamental mikroekonomi, intervensi khusus ini tidak akan efektif dan bahkan seringkali menjadi obyek bagi kegiatan pencari rente dan cenderung merugikan perekonomian secara keseluruhan. Misalnya penghapusan pajak akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membangun institusi atau mengembangkan jaringan infrastruktur yang juga merupakan elemen penting (yang secara umum lebih penting) dibandingkan kebijakan penghapusan pajak sendiri.

### **Biaya Ekonomi dari Korupsi**

Tidaklah meragukan lagi kalau korupsi merugikan masyarakat dan perekonomian. Berbagai studi tentang biaya ekonomi dari korupsi telah dilakukan untuk mendapat basis atau jastifikasi yang kuat dari pemberantasan korupsi.

**Gambar 4**  
**Probabilitas Kehilangan Investasi Swasta Asing Akibat Tingkat Korupsi**



Korupsi mempengaruhi perekonomian dalam pelbagai cara. Misalnya dengan mempengaruhi tingkat investasi. Gambar di atas memperlihatkan hubungan yang positif antara probabilitas kemungkinan kehilangan inventasi swasta asing (FDI) (sumbu horizontal) dengan tingkat korupsi (sumbu vertikal). Korelasi ini tentunya akan terjadi pula untuk investasi dalam negeri karena pengaruh korupsi akan meningkatkan ekonomi biaya tinggi. Studi antara negara menunjukkan penurunan satu unit indeks korupsi ICRG akan meningkatkan rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB atau *output* domestik) sebesar 1,63-1,97 persentase poin.

Alhasil kalau hasil estimasi ini kita gunakan dalam kasus Indonesia kita akan mendapatkan tingkat investasi (terhadap PDB) 2 persen poin lebih kalau kita dapat memperbaiki tingkat korupsi menyamai dengan Malaysia. Penurunan (dan efisiensi) tingkat investasi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun pula. Setiap satu unit peningkatan indeks korupsi ICRG akan berarti peningkatan sebesar 0,5 sampai 0,61 poin persentase dalam PDB per kapita. Artinya dalam kasus Indonesia, kalau kita mampu menyamai tingkat korupsi di Korea Selatan, laju pertumbuhan selama periode 1990-97 dapat mencapai 7,6 persen per tahun dibandingkan 6,3 persen dalam kenyataannya.

Korupsi bukan hanya menurunkan tingkat tetapi juga mendistorsi pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah dan menurunkan kualitas infrastruktur sosial. Korupsi juga menyebabkan pajak terpagut lebih rendah dari potensinya dan mendorong tumbuhnya sektor informal.

Karena penurunan dan disalokasi dari pengeluaran pemerintah korupsi akan merugikan kelompok orang miskin. Orang miskin makin dirugikan mengingat kesempatan untuk mendapatkan tambahan *benefit* dari pertumbuhan ekonomi menjadi hilang. Studi lain menunjukkan bahwa setiap 1 persen laju pertumbuhan ekonomi sama dengan 1,37 persen penurunan tingkat kemiskinan di desa dan 0,57 persen penurunan tingkat kemiskinan di kota. Gambaran ini juga didukung oleh studi antar negara yang menunjukkan korelasi yang kuat antara peningkatan tingkat korupsi dengan penurunan kondisi indikator pembangunan manusia seperti tingkat kematian dan lain-lain.

## 6. Kesenjangan Institusi di Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan alasan yang kuat bagi pemerintah untuk mendorong reformasi institusi untuk memberikan manfaat yang optimum bagi Indonesia dalam memanfaatkan proses globalisasi dan sekaligus menghindari dampak sampingan dari globalisasi.

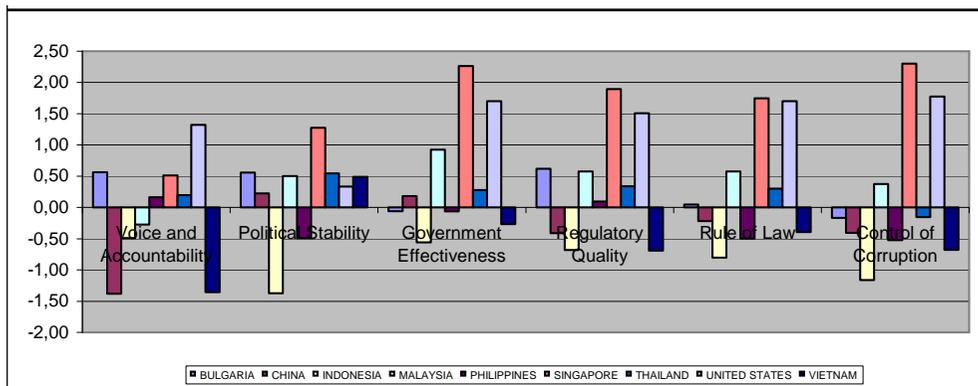
*Assessment* terhadap kondisi institusi di suatu negara tergolong sulit karena sebagian merupakan persepsi dari responden. Perbandingan antar negara pun menjadi sulit karena tidak semua responden pernah berhubungan dengan negara yang dipilih sehingga membaca indeks institusi pun harus berhati-hati. Tetapi minimal proksi indeks institusi ini memberikan arah (*guide*) bagi kita untuk mengetahui posisi Indonesia di antara negara lain.

Kaufmann et.al.(2003), mencoba mengidentifikasi dan mengestimasi 6 indikator institusi yang kurang lebih *fit* dengan elemen institusi utama yang menjadi salah satu fundamental mikroekonomi yaitu (i) indeks *voice* dan *accountability*; (ii) indeks kestabilan politik; (iii) indeks *government effectiveness*; (iv) indeks kualitas regulasi; (v) indeks hukum

dan penegakan hukum dan (vi) indeks pemberantasan korupsi. Semakin tinggi nilai indeksnya makin baik kualitas institusi di negara yang bersangkutan.

**Gambar 5** menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antara negara yang berpendapatan sepadan dan kompetitor Indonesia atau negara maju. Hampir di semua kategori Indonesia adalah negara yang paling “buntut” yang mencerminkan masih besarnya kesenjangan institusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi (*high quality growth*).

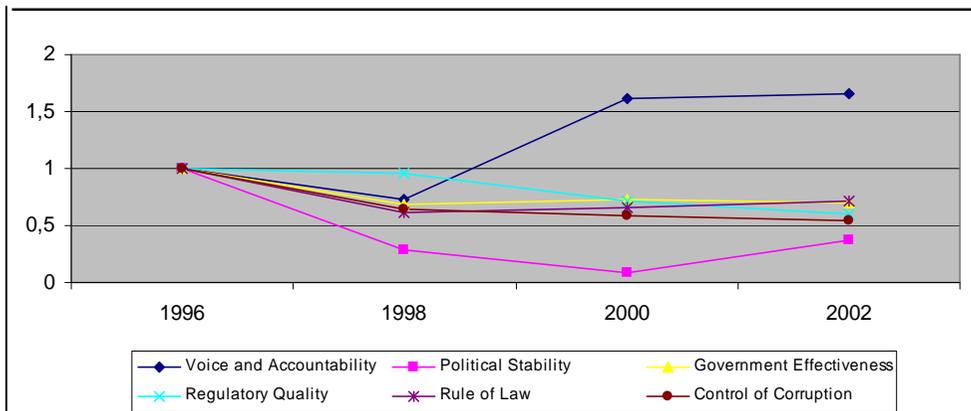
**Gambar 5**  
**Institutional Index, 2002**



Sumber : Kaufman et.al, 2003

Yang lebih menguatirkan kecuali dalam bidang kebebasan berpendapat, hampir semua indikator lain menunjukkan tren yang memburuk baik dibandingkan keadaan sebelum krisis ekonomi maupun dalam proses penyesuaian antara tahun 1998-2002.

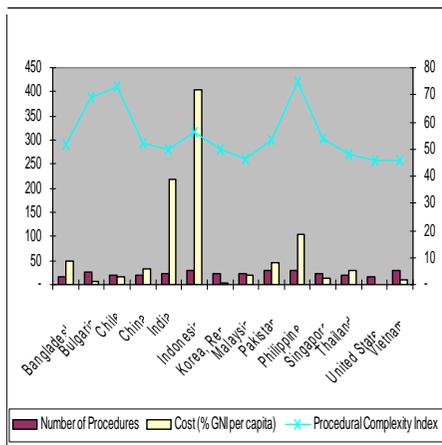
**Gambar 6**  
**Indonesia : Tren Indeks Institusi, 1996-2002**



Sumber : Kaufman et.al, 2003

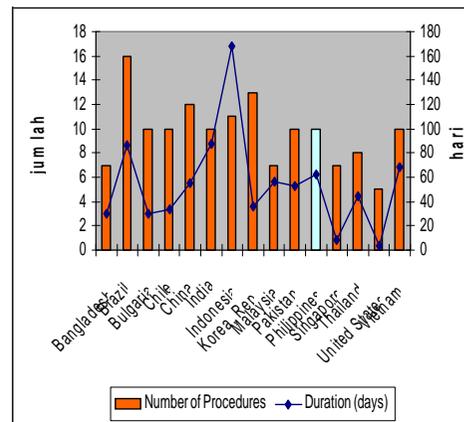
Gambaran ini konsisten dengan indikator lain yang digunakan dalam mengukur indikator iklim investasi seperti *regulatory cost* dan kompleksitas, *contract enforcement* atau hukum perburuhan dimana hampir semua indikator menunjukkan Indonesia dewasa ini bukanlah negara yang nyaman untuk dijadikan tempat investasi. Hal ini sekaligus memberikan gambaran bahwa proses reformasi di Indonesia terutama ekonomi belum berjalan seperti yang seharusnya dan belum memperbaiki fundamental mikroekonomi. Kondisi ini juga akan memberikan peluang terulang krisis ekonomi cukup besar dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Agenda perbaikan fundamental ekonomi hendaknya menjadi agenda pemerintah Megawati dalam satu tahun mendatang dan harus dilanjutkan oleh Pemerintah hasil Pemilu 2004.

**Gambar 7**  
**Contract Enforcement Indicators**



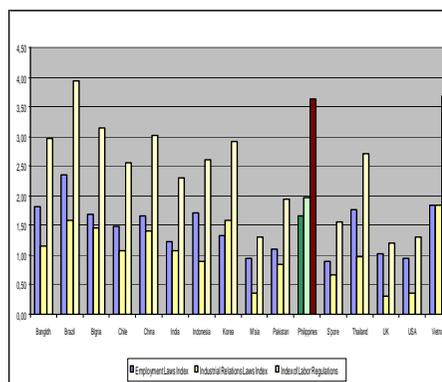
Sumber : World Bank

**Gambar 8**  
**Entry Regulation di Beberapa Negara**



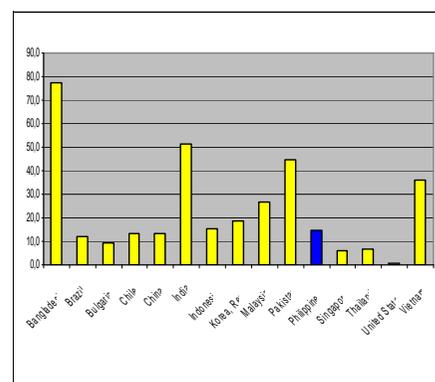
Sumber : World Bank

**Gambar 9**  
**Indeks Perburuhan di Beberapa Negara**



Sumber : World Bank

**Gambar 10**  
**Regulatory Cost (% of GNI per capita)**



Sumber : World Bank

## **7. Daftar Pustaka**

- Bardhan, Pranab (1997). The Nature of Institutional Impediments to Economic Development. *Mimeograph*. Berkeley, Calif.: Department of Economic, University of California, Berkeley.
- Becker, Gary (1983). A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence. *Quarterly Journal of Economics*, 98(3): 371-400.
- Brunetti, Aymo; Gregory Kisunko; and Beatrice Weder (1997a). Credibility of Rules and Economic Growth. *Policy Research Working Paper* No. 1760. Washington, D.C.: World Bank.
- Burki, Shahid Javed, and Guillermo Perry (1997). The Long March: A Reform Agenda for Latin America and the Caribbean in the Next Decade. Washington, D.C.: World Bank, *Latin American and Caribbean Studies Viewpoints Series*.
- Caballero, Ricardo, and Vittorio Corbo. (1989). The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Exports: Empirical Evidence, *World Bank Economic Review* 3(2): 263-78.
- Chowdhurie-Aziz, Monali (1997). Political Openness and Economic Performance. *unpublished paper*, University of Minnesota, January.
- Diamond, Douglas (1989). Reputation Acquisition in Debt Markets. *Journal of Political Economy*, 97:828-862.
- Dixit, Avinash K. (1996). *The Making of Economic Policy: A Transaction-Cost Politics Perspective*. Cambridge, Mass and London: The MIT Press.
- Drazen, Allan, and Vittorio Grilli (1993). The Benefit of Crises for Economic Reforms. *The American Economic Review*, 83: 598-607.
- Fernandez, Raquel, and Dani Rodrik (1991). Resistance to Reform: Status Quo Bias in the Presence of Individual-Specific Uncertainty. *American Economic Review*, 81\*5):1146-1155.

- Graham, Carol, and Moises Naim, (1998). The Political Economy of Institutional Reforms in Latin America. In *Beyond Trade-Offs: Market Reforms and Equitable Growth in Latin America*, edited by N. Birdsall, C. Graham, and R. Sabot. Washington, D.C.: The Brookings Institution
- Hanson, James A. (1995). Monetary and Fiscal Policy in Indonesian Economy, *presented at the Seminar* Marking the 40<sup>th</sup> Anniversary of the Faculty of Economics at Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia, Mimeo.
- Hausman, Ricardo, and Michael. (1995). Macroeconomic Volatility in Latin America: Causes, Consequence and Policies to Assure Stability, Inter-American Development Bank, Office of Chief Economist, Washington D.C.
- Isham, Jonathan, Daniel Kaufmann, and Lant Pritchett, Civil Liberties, Democracy, and the Performance of Government Projects, *The World Bank Economic Review*, May 1997, 219-42.
- J.P. Morgan.(1997). *Asian Financial Market*, First Quarter, 1997, Singapore.
- Klitgaard, Robert, and Heather Baser (1997). Working Together to Fight Corruption: State, Society and the Private Sector in Partnership, in Suzanne Taschereau and Jose Edgardo L. Campos, eds., *Governance Innovations (Lessons from Experience: Building Government-Citizen-Business Partnerships)*. Ottawa: Institute of Governance.
- Knack, Stephen, and Philip Keefer (1995). Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures. *Economics and Politics*, 7(3):207-227.
- Knack, Stephen, and Philip Keefer (1997a). Why Don't Poor Countries Catch Up? A Gross-National Test of an Institutional Explanation. *Economic Inquiry*, 35:590-602 (July).
- Mouro, Paolo (1995). Corruption and Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 110:681-712.
- Mishkin, Frederic S. (1991). A Historical Perspective. In *Financial Markets and Financial Crises*, edited by R.H. Hubbard. Chicago: University of Chicago Press.

North, Douglass (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.

----- (1994). Economic Performance Through Time. *The American Economic Review*, 84(3):359-368.

North, Douglass C. Dalam Jonh Harris et.al (eds). *The New Institutional Economics and Third World Development*.

Olson, Mancur (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory Groups*. Cambridge, Mass, and London: Harvard University Press.

Olson, Mancur (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. *American Political Science Review*, 87(3):567-576.

Perry, Guillermo (1997). The Political Economy of Financial Reforms. *Paper and Presented at the Conference on Building Robust Banking Systems, World Bank Annual Meetings, Hong Kong, China*.

Perry, Guillermo, and Daniel Lederman (1998). Financial Vulnerability, Spillover Effects, and Contagion: Lessons from the Asian Crises for Latin America. Washington, D.C.: World Bank, *Latin America and Caribbean Studies Viewpoint Series*.

Porter, Michael. (1990). *The Competitive Advantage of the Nations* New York, NY: the Free Press,

Roberts, Mark, T. Sullivan, and J. Tybout. (1995). What Makes Export Boom? Evidence from Plant-Level Panel Data. International Trade Division, Washington, DC

Rodrik, Dani, Understanding Economic Policy Reform, *Journal of Economic Literature*, March 1996, 9-41.

----- (2000). Institutions for High Quality Growth, *What They Are and They Are and How to Acquire Them*, NBER WP. No.7540, February 2000.

----- (1999) (b) Democracies Pay Higher Wages, *Quarterly Journal of Economics*, August

----- (1989). Promises: Credible Policy Reform via Signaling. *The Economic Journal*, 99:756-772.

----- (1996), *Why Do More Open Economies Have Larger Governments*, processed.

Schmidt-Hebbel ., (1995), Fiscal Adjustment and Growth: In Out of Africa. *World Bank Policy Research Department*, Macroeconomics and Growth Division, Washington D.C.

Stiglitz, Joseph E., and Andrew Weiss (1981). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. *American Economic Review*, 71:393-410 (June).

-----, (1986). *Economics of the Public Sector*. New York and London: W.W. Norton & Company.

-----, (1993). The Role of the State in Financial Markets. Washington, D.C.: *World Bank's Annual Conference on Development Economics*.

Tornell, Aaron (1995). Are Economic Crises Necessary for Trade Liberalization and Fiscal Reform? The Mexican Experience. In *Reform, Recovery, and Growth: Latin America and the Middle East*, edited by R. Dornbusch and S. Edwards. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Williamson, John (1990). What Washington Means by Policy Reform. In *Latin American Adjustment: How Much Has Happened*, edited by J. Williamson. Washington, D.C.: The Institute for International Economics.

----- (1983). *The Open Economy and the World Economy*, New York, NY: Basic Book Inc Publisher.

Williamson, Oliver (1994). The Institutions and Governance of Economic Development and Reform. *Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, 1994*. Washington, D.C.: World Bank.

World Bank. (1995a). *Global Economic Prospect and The Developing Countries*, Washington D.C.

----- (1996), *Global Economic Prospect and The Developing Countries*, Washington D.C.

----- (1995b), Indonesia: Dimension of Growth. *Report No. 15383-IND*, May.